



DIPLOMASI INDONESIA DI PENGHUJUNG 2017

ANALISIS HUBUNGAN INTERNASIONAL
SERI 7 (2017)

Analisis Hubungan Internasional merupakan esai sebagai bentuk respon atau pemikiran dalam mengamati isu-isu kontemporer hubungan internasional terkini.

hi.fisip.unsoed.ac.id

[@hiunsoed](https://www.instagram.com/hiunsoed)

Pada tanggal 25 September 2017, the Asia Society yang merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang analisis kebijakan luar negeri (*policy institute*) di New York City, Amerika Serikat (AS), mengundang Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi untuk menjelaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia di tahun 2017 ini.

Menteri Retno Marsudi beserta Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla berada di New York City pada bulan September untuk menghadiri Sidang Umum Majelis Umum PBB ke-72 yang diadakan pada tanggal 18-29 September 2017. Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan pemimpin delegasi diplomasi Indonesia untuk Sidang Umum Majelis Umum PBB tersebut. Dalam pernyataan resminya, The Asia Society menjelaskan profil Retno Marsudi sebagai “*the first female Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, sworn in as [a] member of President Joko Widodo’s Working Cabinet in 2014*” (Menteri luar negeri wanita pertama di Indonesia, yang merupakan anggota kabinet Presiden Indonesia Joko Widodo).

Retno Marsudi hadir di the Asia Society untuk memberikan kuliah umum mengenai posisi strategis Indonesia di wilayah Asia Tenggara sebagai salah satu negara pendiri organisasi ASEAN dan sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia yang mengadopsi sistem demokrasi. Indonesia sebagai anggota ASEAN harus mampu membangun dialog yang membangun dan sesuai dengan ASEAN Way. ASEAN Way adalah pendekatan diplomatis negara-negara ASEAN yang pada intinya menyebutkan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri tiap negara anggota, tidak memperlakukan sesama negara ASEAN, serta mengutamakan kerja sama dan dialog dalam setiap penyelesaian konflik. Retno Marsudi menjabarkan ASEAN Way dalam empat artian, yaitu: *avoid confrontation; culture of dialogue; culture of equality; rule-based organization* (menghindari konfrontasi; membangun budaya berdialog; budaya saling menghargai; dan organisasi yang berdasarkan aturan).

DIPLOMASI INDONESIA DI PENGHUJUNG 2017

ANALISIS HUBUNGAN INTERNASIONAL
SERI 7 (2017)

Peran strategis Indonesia tersebut membantu dalam menyelesaikan masalah konflik Rohingya di Myanmar yang menjadi salah satu perhatian dunia saat ini. Tidak kurang dari 400 ribu pengungsi Rohingya lari dari desa mereka di wilayah Rakhine dan membanjiri negara-negara tetangga seperti Bangladesh dan Thailand. Menlu Retno menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai komitmen tinggi untuk membantu menyelesaikan konflik Rohingya dengan cara membangun dialog antara berbagai pihak yang terkait, diantaranya Daw Aung San Suu Kyi sebagai tokoh penting di Myanmar, petinggi militer Myanmar, dan Perdana Menteri Bangladesh Hasina Wajed. Indonesia menegaskan pentingnya semua pihak terkait bekerja sama untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Provinsi Rakhine, Myanmar. Menteri Retno harus melakukan perjalanan dari Jakarta-Yangon-Naypyidaw-Yangon-Dhaka-Singapura-Kuala Lumpur, untuk melakukan dialog dengan berbagai pihak yang terkait dengan masalah ini. Menlu Retno menggambarkan langkah diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia sebagai *the Marathon Diplomacy*.

Isu berikutnya yang dibahas adalah penanggulangan terorisme di Asia Tenggara. Setelah Kota Marawi di selatan Pulau Mindanao, Filipina, direbut oleh kelompok ekstremis lokal yang didukung oleh ISIS (*Islamic State in Iraq and Syria*) pada bulan Mei 2017 lalu, Indonesia membentuk kerja sama trilateral bersama Filipina dan Malaysia. Retno Marsudi menjelaskan bahwa kerja sama trilateral tersebut diantaranya mencakup pengawasan bersama (*joint patrol*) di wilayah Perairan Sulu. Perairan Sulu merupakan salah satu titik rawan tempat masuknya berbagai senjata ilegal, narkoba, dan penyelundupan manusia yang melintasi batas negara Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Selain menyoroti masalah Rohingya dan terorisme, Menteri Retno Marsudi lebih lanjut menjelaskan mengenai fokus kebijakan luar negeri Indonesia yang mencakup: a) *unity and integrity of Indonesia* (keutuhan dan integritas Indonesia); b) *protection of Indonesian citizens abroad* (perlindungan terhadap WNI di luar negeri); c) *economic diplomacy* (diplomasi ekonomi); d) *regional and global contribution* (kontribusi di wilayah regional dan global).

Nuriyeni Kartika Bintarsari

Dosen Hubungan Internasional, Mahasiswa Doktoral Rutgers University